

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
(STUDI PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Bhima Azis Usman, Taufeni Taufik dan M. Rasuli

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tata kelola pemerintahan dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 127 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0,032. Variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0,205. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,062. Angka ini menjelaskan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 6,2%. sedangkan sisanya sebesar 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat saat ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi penyebab terjadinya kecurangan yang sangat kompleks. Kecurangan telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* (Suradi, 2006) terdapat tiga kategori kecurangan yang terjadi, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menipu para penggunanya (Arens, 2013). Sebagian besar kasus melibatkan salah saji terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan terhadap pengungkapan.

Kecurangan dalam penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian aset milik suatu entitas. Istilah penyalahgunaan aset sering kali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan pihak-pihak internal lainnya didalam suatu organisasi (Arens, 2013). Kecurangan dalam bentuk korupsi adalah kecurangan relatif sulit untuk dideteksi karena melibatkan berbagai pihak, baik dari intern maupun ekstern organisasi (Suradi, 2006). Praktek korupsi banyak dijumpai di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena secara umum di negara-negara tersebut hukum belum ditegakkan secara baik. Ini dapat dilihat pada Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia dengan skor 34 dengan Indeks Persepsi Korupsi mulai diperingkat dari angka 0 – 100, nilai 100 adalah tingkat korupsi paling rendah (Bisnis Indonesia, 2014). Bila seluruh negara diukur, Indonesia berada pada posisi 107 dari 175 negara. Skor 34 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat, tapi juga telah terjadi terhadap pemerintah daerah. Ini terjadi karena keuangan daerah tidak luput dari imbas sistem reformasi yang terjadi di Indonesia. Adanya reformasi dalam pengelolaan sistem keuangan negara melalui otonomi daerah turut menggeser ruang korupsi ke level daerah. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I tahun 2014 yang menunjukkan bahwa terdapat 308 kasus korupsi hasil temuan kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Kompas, 2014). Memang korupsi yang menyebabkan kerugian negara relatif lebih besar terjadi pada pemerintah pusat, namun sebagian besar korupsi dilakukan oleh pejabat daerah.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) kecurangan adalah suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Definisi kecurangan di atas menunjukkan aspek dari kecurangan yaitu penipuan, ketidakjujuran, dan niat. Pencegahan kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, dan mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006). Motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan relatif bermacam-macam.

Pemerintah memiliki cita-cita untuk mencegah terjadinya kecurangan di Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah melalui *good governance*. Menurut Tunggal (2010) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Mardiasmo (2009) merumuskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis. Diharapkan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik ini, sistem pemerintahan dapat lebih tertata sehingga dapat mencegah kecurangan.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan. Aprijana (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman *good governance* dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman *good governance* dan keahlian profesional berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman *good governance* yang diterapkan dapat meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dalam institusi.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Wiliyanti (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal dan peran auditor internal terhadap tingkat kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan tidak mempengaruhi tingkat kecurangan, sedangkan efektivitas pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh terhadap kecurangan. Ini terjadi karena prinsip tanggung jawab belum diterapkan dalam diri pejabat pemerintahan sehingga tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat tercapai.

Namun pada kenyataannya masih terjadi tindakan kecurangan pada pemerintahan, meskipun tata kelola pemerintahan yang baik telah dilaksanakan. Jika melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, sistem pengendalian internal menjadi salah satu permasalahan yang sering dilanggar oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu untuk mewujudkan pencegahan kecurangan diperlukan suatu sistem pengendalian internal untuk mencegah kecurangan tersebut. Menurut Mulyadi (2008) sistem pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Ini berarti sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Tunggal (2010) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian intern yang baik. Ini menunjukkan bahwa salah satu teori *fraud triangle* yaitu kesempatan berbuat curang.

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses atau wewenang untuk mengatur proses pengendalian. Namun apabila sistem pengendalian berjalan dengan baik, maka lingkungan yang terkendali bisa diwujudkan dan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kebijakan dan pengawasan akan dapat berjalan lurus dan mengecilkan nilai-nilai resiko yang nantinya akan terjadi. Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang baik. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian internal, maka semakin dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) tentang analisis pengaruh faktor internal dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya pengendalian internal, maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dihindarkan, ini terjadi karena didalam lingkungan DPKAD telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala perilaku kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan dapat terdeteksi dan kinerja para karyawan dapat dipantau secara berkala. Penelitian yang dilakukan Najahningrum (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi dan pengaruh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, artinya sistem pengendalian yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Aryanto (2014) yang melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal, sistem kompensasi dan asimetri informasi dalam kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan sistem kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas terdapat ketidak konsistenan hasil antara penelitian satu dan penelitian lainnya, hal ini menyebabkan keterkaitan antara pengaruh pengaruh tata kelola pemerintahan dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan masih merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Selain itu penulis tertarik untuk meneliti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kecurangan merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan tindakan merugikan orang lain dengan cara-cara yang tidak jujur dengan tujuan pengambilan keuntungan untuk diri pribadi maupun untuk pihak-pihak tertentu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2013) perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting.

Menurut Suradi (2006) kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang atau kelompok lain dengan cara melawan hukum. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk organisasi baik di sektor pemerintah maupun swasta dan pelakunya berasal dari pihak intern maupun ekstern organisasi.

Menurut *Asociation of Certified Fraud Examiner* (ACFE) (Suradi, 2006) sebagai salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan kecurangan akuntansi mengkategorikan kecurangan dalam 3 jenis yaitu :

- a. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*)
Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
- b. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)
Penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung.
- c. Korupsi (*corruption*)
Jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi dinegara-negara berkembang yang menegakkan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

Suradi (2006) mengemukakan dalam *fraud triangle*, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tekanan (*Pressure*)
Tekanan melakukan *fraud*, dapat terjadi karena dalam kehidupan dapat menciptakan tekanan situasional yang signifikan, sehingga pada suatu saat akan diuji tentang etika dan kejujurannya.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya *internal control* perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, dan mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006). mencegah kecurangan mencakup dua aktivitas utama, yaitu :

a. Menciptakan dan memelihara budaya kejujuran, keterbukaan dan asistensi.

1. Menuntut manajemen puncak untuk berperilaku sesuai dengan etika.
2. Merekrut pegawai yang jujur dan berkualitas.
3. Mengkomunikasikan ekspektasi organisasi dan melakukan konfirmasi tertulis secara periodik.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang positif.
5. Mengembangkan dan memelihara kebijakan yang efektif untuk menghukum pelaku kecurangan.

b. Menilai dan mengurangi resiko terjadinya kecurangan, Mengidentifikasi sumber resiko secara akurat dan mengukur resiko.

1. Mengimplementasikan pengendalian yang bersifat preventif dan detektif.
2. Menciptakan pemantauan yang diperluas oleh karyawan.
3. Melaksanakan pengecekan secara independen, mencakup adanya suatu fungsi audit yang efektif.

Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dengan Pencegahan Kecurangan

Tata kelola pemerintahan merupakan serangkaian prinsip-prinsip yang dijalankan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Baik dalam artian bahwa pemerintahan harus sesuai dengan norma, hukum serta menjadi wadah penyaluran aspirasi rakyat. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola agar tercapai pemerintahan yang bersih. Tata kelola disuatu instansi pemerintahan yang direncanakan dengan baik dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut agar berjalan efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2009) *good governance* memiliki pengertian sebagai cara mengelola urusan-urusan politik dengan baik. Menurut Tunggal (2010) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik ini, sistem pemerintahan dapat lebih tertata sehingga dapat mencegah kecurangan.

Banyak penelitian yang menggunakan tata kelola pemerintahan sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprijana (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman *good governance* dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman *good governance* dan keahlian profesional berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman *good governance* yang diterapkan sesuai dengan aturan kode etik, maka seorang auditor mampu meningkatkan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan penyajian laporan keuangan melalui pengawasan yang akuntabel dan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dalam institusi. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Gusnardi (2009) yang melakukan penelitian tentang pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan menyatakan bahwa komite audit, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Semakin tinggi pemahaman pelaksanaan tata kelola perusahaan maka semakin tinggi pencegahan kecurangan yang terjadi, yang artinya dapat mengurangi terjadinya kecurangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ratnayani (2014) tentang pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi *good governance* terhadap *fraud*. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengendalian intern kas dan implementasi *good governance* berpengaruh terhadap *fraud*, hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi *good governance* maka semakin rendah *fraud* yang terjadi pada pemerintahan. Dengan diterapkan *good governance* yang baik akan dapat menekan sedini mungkin praktik kecurangan yang terjadi dalam tubuh instansi di pemerintahan.

Sedangkan penelitian Husna (2013) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnayani (2014) juga menunjukkan pengaruh implementasi *good governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian-penelitian yang telah ada, maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari beberapa bukti empiris yang dikemukakan di atas, maka hipotesis yang dikemukakan disini adalah:

H1: tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Hubungan Pengendalian Internal dengan Pencegahan Kecurangan

Dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan Sistem pengendalian internal pemerintah ini terdiri dari lima unsur yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Tujuan dari pengendalian internal ini adalah agar kegiatan dalam pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem pengendalian yang diterapkan secara baik diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dan diharapkan mampu mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mencegah kecurangan. Sehingga terjaminnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian dan penyimpangan. Selain itu, pengendalian yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah bagi para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan merugikan pemerintah dan menguntungkan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian internal, maka semakin dapat mencegah terjadinya kecurangan. Diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan bahwa pencegahan kecurangan dapat terwujud.

Menurut Tunggal (2010) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian intern yang baik. Apabila sistem pengendalian berjalan dengan baik, maka lingkungan yang terkendali bisa diwujudkan dan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut (Rahmawati, 2012). Ini menunjukkan bahwa salah satu teori *fraud triangle* yaitu kesempatan berbuat curang terjadi. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses atau wewenang untuk mengatur proses pengendalian. Hal ini dapat berupa jabatan, tanggung jawab maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan.

Namun apabila sistem pengendalian berjalan dengan baik, maka lingkungan yang terkendali bisa diwujudkan dan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kebijakan dan pengawasan akan dapat berjalan lurus dan mengecilkan nilai-nilai resiko yang nantinya akan terjadi.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) tentang analisis pengaruh faktor internal dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya pengendalian internal, maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terhindarkan, ini terjadi karena didalam lingkungan DPKAD telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala perilaku kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan dapat terdeteksi dan kinerja para karyawan dapat dipantau secara berkala.

Penelitian yang dilakukan Najahningrum (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan pengaruh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, artinya sistem pengendalian yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan. Sedangkan penelitian Wilopo (2006), Gusnardi (2009), Husna (2012), Ratnayani (2014), Wiliyanti (2013) dan Amelia (2012) juga menunjukkan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian-penelitian yang telah ada, maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. H2 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas (Eselon II), Kepala Bagian atau Bidang (Eselon III), dan Kepala Sub Bagian atau Seksi (Pejabat Eselon IV) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 127 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2002). Lokasi pada penelitian ini adalah Instansi di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Maret sampai dengan April 2015.

Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini adalah menggunakan metode survei melalui kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Pencegahan kecurangan dibedakan menjadi dua aktivitas utama yaitu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan asistensi, dan menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang (Suradi, 2006). Sub variabel pencegahan kecurangan yang digunakan dalam penelitian ini telah dikembangkan oleh Taufik (2013) adalah menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan asistensi, dan menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal 7 point.

Variabel tata kelola pemerintahan diukur dengan menggunakan instrument yang telah dikembangkan oleh Taufik (2013) dengan menggunakan 3 indikator yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal 7 point. Variabel pengendalian internal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrument yang terdapat didalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal 7 point.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh tata kelola pemerintahan dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pencegahan Kecurangan

α = Konstanta

$\beta_{(1,2)}$ = Koefisien regresi masing-masing X

X₁ = Tata Kelola Pemerintahan

X₂ = Pengendalian Internal

e = *error*

Penelitian ini telah melalui serangkaian uji normalitas dan uji asumsi klasik yaitu autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah adalah Kepala Dinas (Eselon II), Kepala Bagian atau Bidang (Eselon III), dan Kepala Sub Bagian atau Seksi (Pejabat Eselon IV) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan jumlah sampel sebanyak 127 responden. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pencegahan kecurangan. Secara keseluruhan jawaban rata-rata responden terhadap pertanyaan pencegahan kecurangan adalah sebesar 6,0. Dengan demikian pencegahan kecurangan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah diterapkan dengan sangat baik sekali.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan jawaban rata-rata responden terhadap pertanyaan tata kelola pemerintahan adalah sebesar 5,3. Dengan demikian tata kelola pemerintahan pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah diterapkan dengan sangat baik.

Dalam penelitian ini yang juga menjadi variabel independen adalah pengendalian internal. Secara keseluruhan jawaban rata-rata responden terhadap pertanyaan pengendalian internal adalah sebesar 6,2. Dengan demikian pengendalian internal pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah diterapkan dengan sangat baik sekali.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan tabel analisis regresi linear berganda pada Tabel 1 :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.585	.592		7.744	.000
	Tata Kelola Pemerintahan	.108	.050	.205	2.172	.032
	Pengendalian Internal	.134	.105	.120	1.276	.205

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang terdapat di Tabel 4.13, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 4,585 + 0,108 X_1 + 0,134 X_2 + e$$

Dalam model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 4,585 menyatakan bahwa jika variabel tata kelola pemerintahan dan pengendalian internal dianggap konstan, maka pencegahan kecurangan akan meningkat sebesar 4,585.
2. Variabel independen pertama yang digunakan yaitu tata kelola pemerintahan. Dari tahapan pengujian diketahui bahwa variabel tata kelola pemerintahan memiliki arah dan slop koefisien regresi sebesar 0,108 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan tata kelola pemerintahan sebesar 1%, maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 0,108%.
3. Variabel independen kedua yang digunakan yaitu pengendalian internal. Dari tahapan pengujian diketahui bahwa variabel pengendalian internal memiliki arah dan slop koefisien regresi sebesar 0,134 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan pengendalian internal sebesar 1%, maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 0,134%.

Diketahui *adjusted R Square* sebesar 0.062. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah $0,062 \times 100\%$ atau sebesar 6,2%, sedangkan sisanya sebesar 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel	Sig.	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan	0,032	Berpengaruh

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.15 tingkat signifikansi sebesar $(0,032) < 0,05$, ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan, maka suatu lembaga diharapkan tumbuh dan berkembang secara sehat, terhindar dari segala macam praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan (Suruji, 2007). Setiap SKPD yang menggunakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan cermat, maka akan mengurangi kasus kecurangan yang terjadi didalam instansi-instansi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang terdapat pada tata kelola pemerintahan dapat mencegah kecurangan di instansi pemerintah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang terdapat di SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Gusnardi (2009), Aprijana (2014), Ratnayani (2014), dan Husna (2013) yang juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiliyanti (2013) yang menyimpulkan bahwa variabel tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengendalian Internal	0,205	Tidak Berpengaruh

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.16 tingkat signifikansi sebesar $(0,205) > 0,05$, ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dan H_2 ditolak. Ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Keberhasilan pengendalian internal pemerintah tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Rahmawati (2012) mengungkapkan bahwa pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa salah satu teori *fraud triangle* yaitu kesempatan berbuat curang terjadi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kecurangan ini dilakukan karena seseorang memiliki kesempatan untuk melakukannya, yang dapat berupa akses atau wewenang untuk mengatur proses pengendalian, ini dapat berupa jabatan, tanggung jawab maupun otorisasi yang memudahkan kesempatan berbuat curang.

Selain kesempatan untuk berbuat curang, salah satu unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal (PP No. 60, 2008). Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian internal. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang efektif harus ada pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang dimiliki oleh suatu instansi untuk memenuhi tujuan sasaran dari instansi tersebut.

Kebutuhan ini terkadang disalah artikan oleh beberapa oknum sebagai kepentingan pribadi atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu timbullah kerjasama antara beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan dalam mempermudah dan memperlancar kepentingan pribadinya. Jadi, sebaik apapun suatu sistem pengendalian internal yang berada disuatu pemerintahan, apabila pejabat menyalahgunakan wewenangnya maka suatu kolusi akan terjadi. Sehingga suatu pengendalian internal tidak berpengaruh dalam melakukan pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aryanto (2013) yang juga mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012), Najahningrum (2013), Wilopo (2006), Wiliyanti (2013) dan Amelia (2012) yang mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir)”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat menunjukkan bahwa variabel tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
3. Koefisien determinasi sebesar 0,062. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 6,2%, sedangkan sisanya sebesar 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga sulit untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi secara menyeluruh yang terjadi di Indonesia.
2. Dalam penelitian ini masih ada 93,8% variabel independen lain yang bisa mempengaruhi variabel dependen, dengan begitu tentu penelitian ini masih sangat perlu untuk dilanjutkan. Karena dengan adanya kelanjutan tentang penelitian ini, maka akan dapat menemukan variabel-variabel independen lainnya yang menunjukkan tingkat koefisien determinasi yang mencapai tingkat maksimal sebesar 100%.
3. Penulis pada penelitian ini tidak bisa mengendalikan jawaban responden, mengingat kesibukan dari pihak SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Karena pengetahuan dan pandangan responden yang berbeda-beda terhadap masa jabatan dan usia yang dimiliki para responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu bisa menggambarkan keadaan sebenarnya.

Saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mencakup wilayah SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mencakup wilayah yang lebih luas atau wilayah yang lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat memandu para responden untuk mengisi ataupun menjawab kuesioner. Dan meluangkan waktu untuk memantau kuesioner kembali, agar mengurangi kuesioner yang diabaikan atau yang sembarang diisi oleh responden.

3. Dengan adanya satu hipotesis yang berpengaruh, maka diharapkan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk selalu menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk satu hipotesis yang tidak berpengaruh, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pejabat, untuk meminimalisasi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dengan begitu, sistem pengendalian internal dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Lisa Herman. 2012. "Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan". Universitas Negeri Padang. *Artikel Ilmiah*. Padang.
- Arens, Alvin A. Elder. Randal J. Beasley, Mark S. Arens, Alvin A. Jusuf, Amir Abadi. 2013. "Jasa *Audit* dan *Assurance*: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)". Salemba Empat. Jakarta.
- Aryanto, Muhammad Suharyadi. Tri Hesti Utamingtyas. Ratna Anggraini ZR. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi, dan Asimetri Informasi dalam Kecenderungan Kecurangan Akuntansi". Simposium Nasional Akuntansi XVI. 25-28 September 2013. Manado
- Aprijana, A. A. Gede Rahadi. Adiputra, I Made Pradana. Darmawan, Nyoman Ari Surya 2014. "Pengaruh Pemahaman *Good Governance* dan Keahlian Profesional Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem". *E-Jurnal SI Ak*. Vol: 2 No: 1. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2007. Peraturan No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau. 2013. Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2013. Siaran Pers.
- Gusnardi. 2009. "Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. ISSN1411-0393. Ekuitas Akreditasi No.110/DIKTI/Kep/2009. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.
- Husna. Fitriatil. 2010. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan". Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. "Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen". Edisi II. BPFE UGM. Yogyakarta.

- Kompas. 2014. "ICW: Kasus Korupsi di 2014 Meningkat".<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/17/16011471/ICW.Kasus.Korupsi.di.2014.Meningkat>. Diakses Tanggal 25 Februari 2015.
- Mardiasmo. 2009. "Akuntansi Sektor Publik". Edisi IV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2008. "Sistem Akuntansi". Cetakan Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Najahningrum, Anik Fatun, Sukardi Ikhsan, Maylia Pramono Sari. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Universitas Negeri Semarang. Simposium Nasional Akuntansi XVI. 25-28 September 2013. Manado.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- Rahmawati, Ardiana Peni, 2010. "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang". Jurnal.
- Ratnayani, Putu Ayu, Sujana, Edi, Darmawan, Nyoman Ari Surya 2014. "Pengaruh Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Governance* Terhadap *Fraud*". E-Jurnal S1 Ak. Vol: 2 No: 1. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suradi. 2006. "Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Swasta. Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian Pencegahannya dan Etika Bisnis". Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Taufik, Taufeni. 2010. "Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor Dan DPRD Terhadap Pencegahan Kecurangan (Sensus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau)". Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekbis Jurnal, Vol. 2, No. 2, Juli 2010: 292-300.
- Taufik, Taufeni, Dian Kemala. 2013. "Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekbis Jurnal, Vol. 5. No. 1. Maret 2013 :51-63.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2010. "Dasar-Dasar Audit Intern Pedoman Untuk Auditor Baru". Harvarindo. Jakarta.
- Wiliyanti, Rizke, Ria Nelly Sari, Edfan Darlis. 2013. "Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan: Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi" Jurnal.
- Wilopo, 2006. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang, 23-26 Agustus 2006.